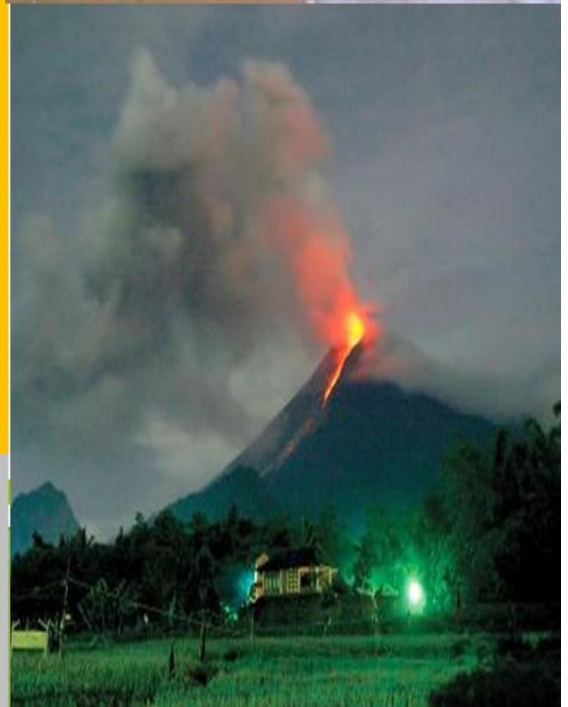
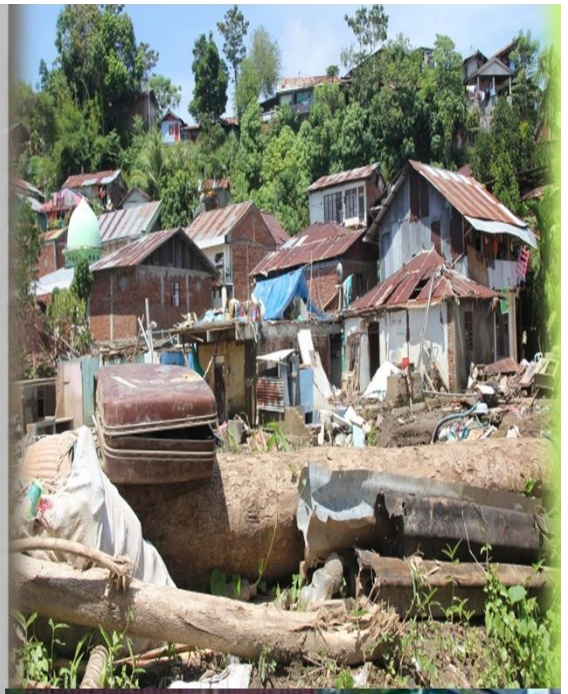




# LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA  
KABUPATEN SELUMA



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **I.1. GAMBARAN UMUM ORGANISASI**

##### **1.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD BPBD Kabupaten Seluma**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Lain Perangkat daerah Daerah Kabupaten Seluma, dan Peraturan Bupati Seluma Nomor 43 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma memiliki tugas pokok untuk melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana di Daerah yaitu:

- 1 Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- 2 Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 3 Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- 4 Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- 5 Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan pada setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- 6 Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- 7 Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- 8 melaksanakan kewajiban lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Serta mempunyai fungsi:

- 1 Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- 2 Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, resiko dan dampak bencana.

##### **1.1.2. STRUKTUR ORGANISASI**

Struktur Organisasi BPBD dibuat dengan mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Perangkat Daerah Kabupaten Seluma dan Peraturan Bupati No 43 Tahun 2010 tentang

Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas BPBD Kabupaten Seluma. Adapun struktur organisasi BPBD terdiri dari

- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah;
- c. Unsur Pelaksana.

1. Unsur Pengarah terdiri dari :

- a. Dinas/Instansi;
- b. Profesional/Ahli;

2. Unsur Pelaksana terdiri dari :

- a. Kepala Pelaksana;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan.
- c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan

4. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari :

- a. Seksi Pencegahan; dan
- b. Seksi Kesiapsiagaan.

5. Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari :

- a. Seksi Tanggap Darurat; dan
- b. Seksi Logistik.

6. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari :

- a. Seksi Rehabilitasi; dan
- b. Seksi Rekonstruksi;

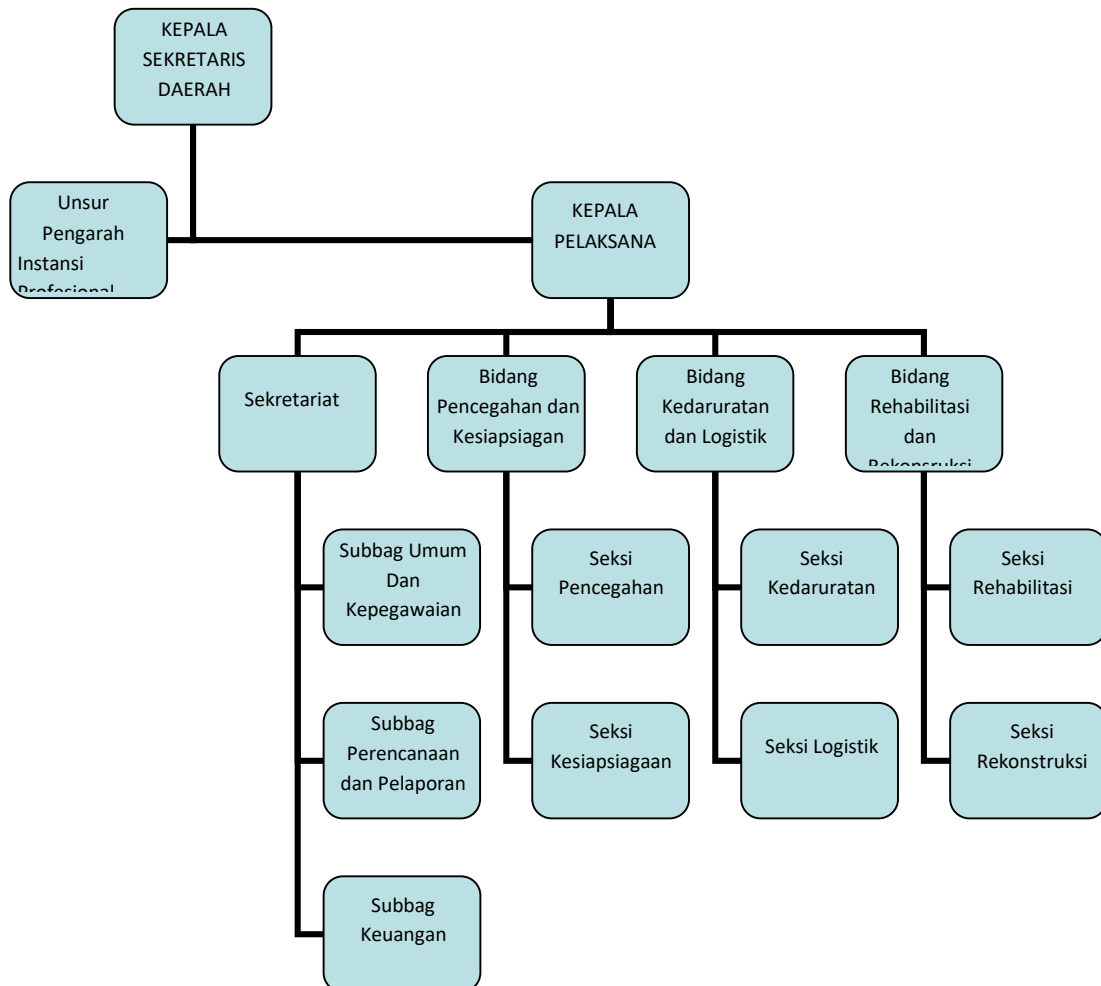


Diagram 1. Stuktur Organisasi BPBD

Sumber : Perbup No 43 tahun 2010 Tentang Tugas Pokok , Fungsi dan Uraian Tugas BPBD

## 1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas dan Ketatalaksanaan menyelenggaraan administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan serta memberikan pelayanan administrasi kepada semua satuan organisasi dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut ,Sekretaris mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan penyusunan rencana, program dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana;
2. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan rumah tangga, inventarisasi dan kearsipan Badan;
3. Memberi petunjuk, arahan dan bimbingan kepada Kepala Sub Bagian untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
4. Mewakili kepala Badan apabila Kepala Badan berhalangan menjalankan tugas;
5. Mengkoordinasi kepala bidang dan kepala sub bagian dalam melaksanakan tugasnya agar terjalin kerjasama yang baik;

6. Melakukan penyusunan organisasi dan ketalaksanaan agar berjalan guna menunjang program kerja badan dan peningkatan pelayanan publik;
7. Membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dan Laporan Akuntabilitas Kinerja badan;
8. Menilai prestasi kerja Kepala sub bagian dilingkungan sekretariat sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

**Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kerja dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Melakukan urusan ketatausahaan dan kearsipan Badan;
3. Melakukan urusan kerumahtanggaan Badan;
4. Melakukan urusan pengelolaan Badan;
5. Melakukan urusan kepegawaian Badan;
6. Menyusun kebutuhan pegawai berdasarkan beban tugas dan analisa jabatan pada Badan;
7. Menyusun tertib administrasi dan kedisiplinan pegawai untuk disampaikan kepada Kepala Badan;
8. Menyusun daftar urut kepangkatan, usulan kenaikan pangkat dan gaji berkali bekal pegawai Badan;
9. Melakukan tugas lain yang diberikian oleh atasan.

**Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan** mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kerja Sekretariat;
2. Mengkoordinir evaluasi dan penyusutan laporan rencana dan prograp kerja Sekretariat dan Bidang dilingkungan BPBD Kabupaten Seluma;
3. Melaporan penyelenggaraan penangungan bencana kepada kepala daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
4. Menghimpun perencanaan dari bidang untuk disusun sebagai rencana dan program kerja BPBD Kabupaten Seluma;
5. Mengumpulkan dan mengkoordinasikan bahan penyusunan program kerja BPBD Kabupaten Seluma;
6. Mengkoordinir laporan Sekretariat dan Bidang sebagai laporan BPBD Kabupaten Seluma;
7. Menghimpun laporan pelaksanaan program dan kewajiban dari bidang untuk selanjutnya dibuat laporan Badan Penanggulangan Bencana daerah secara keseluruhan dan disampaikan kepada Bupati;
8. Menyusun laporan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kerja anggaran Badan yang dihimpun dari rencana kerja anggaran bidang-bidang yang ada;
2. Melakukan urusan keuangan dan perbendaharaan Badan;
3. Menyampaikan laporan, realisasi pertanggungjawaban penggunaan anggaran;
4. Memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
5. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

## **2. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan**

Bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan mempunyai tugas mengkoordinasi dan melaksanakan kebijakan umum di bidang pencegahan bencana dan pemberdayaan masyarakat untuk antisipasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi situasi dan kondisi bencana.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi:

1. Menyusun rencana kerja dan program kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidangnya;
3. Mengkoordinasikan kebijakan pencegahan, antisipasi dan kesiapsiagaan bencana kepada dinas/instansi yang terkait;
4. Merumuskan kebijakan di bidang pencegahan, antisipasi dan kesiapsiagaan bencana;
5. Menilai prestasi kerja bawahan untuk pembinaan pengembangan karier;
6. Menyusun laporan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
7. Melaksanakan tugas lain yang di bebaskan atasan;

### **Seksi Pencegahan** mempunyai tugas :

1. Melaksanakan identifikasi menginventarisir dan membuat peta daerah rawan bencana;
2. Mengelola data dan informasi daerah rawan bencana secara berkala;
3. Memberikan peringatan dini kepada masyarakat sekitar yang di estimasi bakal terjadi atau terkena bencana berdasarkan analisis kemungkinan terjadinya bencana dengan tujuan mengurangi resiko dan bahaya yang akan dihadapi;
4. Melakukan pemantauan terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan dan tata ruang dengan melakukan koordinasi dengan pihak atau instansi terkait;
5. Melakukan sosialisasi atas kondisi objektif daerah daerah rawan bencana dengan menjelaskan resiko, bahaya dan keadaan yang bakal terjadi ketika datang bencana;
6. Memastikan informasi akurat dan diumumkan secepatnya;
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

### **Seksi Kesiapsiagaan** mempunyai tugas :



1. Membentuk dan membina kelompok Masyarakat Tanggap dan Siaga Bencana di setiap Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Seluma;
2. Melaksanakan simulasi dalam menghadapi situasi dan keadaan bencana;
3. Melakukan penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
4. Menyelenggarakan dan atau mengikuti pendidikan, pelatihan dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
5. Membuat peta atau bagian master/utama daerah/tempat terjadinya bencana;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

### 3. Bidang Kedaruratan dan Logistik

Bidang kedaruratan dan logistik mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menginventarisir data kerusakan dan kerugian serta melakukan penyelamatan dan evakuasi serta pemenuhan kebutuhan dasar para korban bencana.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang kedaruratan dan logistik mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kerja dan program kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Merumuskan kebijakan dibidang kedaruratan dan logistik;
3. Mengkoordinasikan dengan dinas/instansi terkait dalam pelaksanaan tugas;
4. Menginventarisasi data kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan akibat bencana;
5. Mengevakuasi korban bencana;
6. Memenuhi kebutuhan dasar korban bencana;
7. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidangnya;
8. Menilai prestasi kinerja bawahan untuk pembinaan dan pengembangan karier;
9. Menyusun laporan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**Seksi Kedaruratan** mempunyai tugas :

1. Melakukan identifikasi secara cepat dan tepat mengenai cakupan lokasi bencana;
2. Melakukan koordinasi dan kerjasama secara baik dengan pihak atau instansi terkait guna membuka keterisoliran sarana transportasi menuju lokasi bencana untuk evakuasi dan distribusi bantuan ;
3. Mendata secara langsung kelapangan untuk mengetahui kebutuhan yang paling dibutuhkan oleh para korban bencana;
4. Melakukan mobilisasi tim atau personil ketempat lokasi bencana;
5. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak/dinas/instansi terkait untuk mempersiapkan tim medis bagi keadaan darurat;
6. Melakukan penyelamatan dan evakusi korban bencana, harta bendadan yang diidentifikasi bakal terkena dampak dari bencana tersebut;

7. Membentuk pos komando lapangan penanggulangan tanggap darurat;
8. Menghitung dan mencatat jumlah korban meninggal dan luka berat, prasarana dan sarana, gangguan pelayanan dan pemerintahan akibat bencana;
9. Memberi bantuan kebutuhan dasar kepada korban bencana;
10. Melakukan koordinasi dan kerjasama secara baik dengan pihak atau instansi yang akan membantu atau sedang/sudah melakukan bantuan kepada korban bencana dilokasi bencana;
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

**Seksi logistik** mempunyai tugas :

1. Mengadakan koordinasi untuk memberikan bantuan kebutuhan dasar kepada korban bencana;
2. Mengendalikan pengumpulan bantuan dari pihak donator/penyumbang dan penyaluran bantuan uang dan barang kepada korban bencana.
3. Menyiapkan dan menyalurkan bantuan barang pasokan untuk pemenuhan kebutuhan dasar kepada korban bencana;
4. Menyiapkan dan memberikan bantuan peralatan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penanggulnagan bencana;
5. Menyiapkan sarana pusat informasi dan komunikasi/call center pelaksana kegiatan penanggulangan bencana;
6. Membuat catatan jumlah dan sasaran bantuan yang akan didistribusikan;
7. Mendata jenis,, jumlah dan penerima bantuan yang sudah disalurkan;
8. Meyiapkan bahan, barang, dan peralatan untuk pelaksanaan pemulihan kerusakan prsarana dan sarana akibat bencana;
9. Melakukan inventarisir peralatan dan perlengkapan BPBD Kabupaten Seluma;
10. Melakukan pengamanan dan perawatan peralatan perlengkapan BPBD Kabupaten Seluma.
11. Setiap dua hari memastikan menghitung persediaan( stock opname )
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

**4. Bidang rehabilitasi dan rekontruksi**

Bidang rehabilitasi dan rekontruksi mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum dibidang penanggulangan bencana pasca bencana

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang rehabilitasi dan rekontruksi mempunyai fungsi:

1. Menyusun rencana kerja dan program kerja sebagai pedoman pelaksanaa tugas;
2. Merumuskan kebijakan rehabilitas dan rekontruksi pasca bencana ;



3. Mengkoordinasikan dengan dinas/instansi terkait dalam melaksanakan rehabilitas dan rekontruksi pasca bencana alam;
4. Membagi tugas kepada bawahan/staff sesuai dengan bidangnya;
5. Memberikan petunjuk kepada bawahan untuk kelancaraan pelaksanaan tugas;
6. Menilai prestasi kerja bawahan/ staff untuk pembinaan pengembangam karier;
7. Meyusun laporan sebagai pertanggungjawaban pelaksnaan tugas;
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan;

**Seksi rehabilitasi** mempunyai tugas :

1. Menginventarisir dan melakukan analisis kerusakan dan kerugian bidang sosial ekonomi dan budaya masyarkat akibat bencana;
2. Menyusun rencana rehabilitas yang didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana dengan memperhatikan aspirasi masyarakat;
3. Menyiapkan dan menyediakan pelayanan kesehatan kepada korban bencana;
4. Melakukan perbaikan lingkungan bencana;
5. Melakukan pemulihan sosial, ekonomi dan budaya;
6. Melakuka pemulihan kondisi psikologis korban bencana;
7. Melakukan pemulihan fungsi pemerintahan;
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

**Seksi Rekontruksi** mempunyai tugas :

1. Menginventarisir dan melakukan analisis kerusakan dan kerugian prasaran dan sarana akibat bencana;
2. Melakukan peningkatan fungsi pelayanan public;
3. Melakukan peningkatan kondisi sosial, ekomomi , dan budaya;
4. Melakukan pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
5. Melakukan perbaikan dan atau pembangunan kembali kerusakan prasarana dan sarana akibat bencana;
6. Melakuan penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan perlatan yang lebih baik dan tahan bencana;
7. Melaksanakan tugas lain yang diberiikan atasan.

## 1.2 MAKSUD & TUJUAN

Maksud dan Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma ini antara lain adalah :

### **Maksud :**

Menyediakan bahan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah OPD sebagai bahan evaluasi kinerja dengan menggunakan pendekatan kinerja yang diawali dengan pernyataan masalah dan target kinerja yang terukur, penetapan arah kebijakan teknis ;

**Tujuan :**

1. Menjamin tersusunnya laporan kinerja berbasis kinerja yang berorientasi pada pelayanan umum secara terukur ;
2. Menjamin konsistensi perencanaan teknis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma dengan arahan strategis Visi dan Misi Kabupaten Seluma sebagaimana dijabarkan di dalam RPJMD tahun 2016 – 2021 ;
3. Memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur dalam bentuk LKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah maupun sebagai bahan masukan dalam penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah sesuai PP No.3 Tahun 2007.

**1.3 DASAR HUKUM**

Penyusunan laporan Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma mengacu kepada :

1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5) ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diganti dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
4. Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagaimana telah diganti dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
7. Permenpan Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 9 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Perangkat Daerah Kabupaten Seluma (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2010 Nomor 09)
6. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Bencana Daerah.

#### 1.4 LINGKUNGAN STRATEGIS YANG BERPENGARUH (ambil dari RPB)

1. Pengembangan kebijakan operasional untuk memanfaatkan kearifan lokal dalam penanganan bencana ;
2. Pengoptimalan pemanfaatan potensi SDM untuk meningkatkan komitmen para pemangku kepentingan dalam upaya peningkatan penanganan bencana
3. Pelaporan capaian kinerja dan keuangan secara akuntabel ;
4. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana kantor ;
5. Peningkatan peran mitra kerja untuk mengatasi keterbatasan basis data ;
6. Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan SDM Aparatur ;
7. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penyediaan data dan perencanaan partisipatif ;
8. Peningkatan disiplin kerja PNS.

#### 1.5. PERMASALAHAN UTAMA ( *Strategic Issued* )

Adapun dalam merealisasikan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2018, terdapat beberapa permasalahan utama yaitu :

1. Keterbatasan personil dan kualifikasi staf BPBD
2. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung penanggulangan bencana.
3. Kurangnya komunikasi dan koordinasi antar instansi terkait penanggulangan bencana.
4. Keterbatasan anggaran dalam penanganan keadaan tanggap darurat bencana.

#### 1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyajian laporan kinerja instansi pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2018 sebagai berikut :

##### BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan umum mengenai Stuktur Organisasi BPBD serta Tugas Pokok Dan fungsi BPBD dengan menekankan kepada aspek strategis Organisasi serta permasalahan utama (*Strategic Issued*) yang dihadapi

##### BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menyajikan ringkasan/ikhtiar perjanjian kinerja BPBD Tahun 2018

##### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

###### A. Capaian Kinerja Organisasi

Menyajikan analisis capaian kinerja BPBD Tahun 2018 dengan pengamatan terhadap target dan realisasi kinerja, capaian kinerja

beberapa tahun terakhir, capaian kinerja dengan target menengah,  
analisis keberhasilan/kegagalan serta analisis penggunaan sumber daya

B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

Menyajikan kesimpulan umum atas capaian kinerja BPBD serta langkah di masa  
mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

LAMPIRAN :

- Perjanjian Kinerja
- Pengukuran Kinerja
- Realisasi Anggaran Per Sasaran

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### II.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana – RI

##### **VISI Presiden**

***“ Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong ”***

Maka Visi BNPB adalah

##### ***“ KETANGGUHAN BANGSA DALAM MENGHADAPI BENCANA ”***

Visi tersebut merupakan gambaran terhadap apa yang ingin diwujudkan BNPB pada akhir pelaksanaan RPJMN 2005 – 2025 yaitu bagaimana negara secara tangguh mampu memberikan perlindungan masyarakat dengan menjauhkan masyarakat dari bencana, menjauhkan bencana dari masyarakat, meningkatkan kemampuan daya lenting masyarakat untuk pulih kembali dari dampak bencana.

Ketangguhan sebagai budaya hidup harmonis berdampingan dengan ancaman bencana yang mengantisipasi, mengadaptasi, memproteksi serta menghindari/meminimalisir dampak bencana, serta memiliki daya serap informasi. Ketangguhan masyarakat secara mandiri dalam penanggulangan bencana menjadi yang pertama dalam setiap upaya penanggulangan bencana.

##### **MISI BNPB**

Berdasarkan amanat UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta sesuai dengan tugas dan fungsi BNPB yang ditetapkan melalui Perpres No 8 Tahun 2008 tentang BNPB, maka ditetapkan misi BNPB Tahun 2015 – 2019 yaitu:

- ( 1 ) Melindungi bangsa dari ancaman bencana dengan membangun budaya pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana menjadi bagian yang terintegrasi dalam pembangunan nasional;
- ( 2 ) Membangun sistem penanganan darurat bencana secara cepat, efektif dan efisien;
- ( 3 ) Menyelenggarakan pemulihan wilayah dan masyarakat pascabencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik yang terkoordinasi dan berdimensi pengurangan risiko bencana;
- ( 4 ) Menyelenggarakan dukungan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana;

- ( 5 ) Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara transparan dengan prinsip good governance.

## TUJUAN

Sebagai penjabaran atas visi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, maka tujuan yang akan dicapai oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam periode pelaksanaan lima tahun kedepan, adalah:

- ( 1 ) Meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap pengurangan risiko bencana, yang terintegrasi dalam dimensi pembangunan dan kehidupan masyarakat;
- ( 2 ) Meningkatkan keandalan dan kecepatan penanganan darurat bencana;
- ( 3 ) Memulihkan daerah terdampak bencana melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
- ( 4 ) Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana sesuai standar minimal yang ditetapkan BNPB;
- ( 5 ) Meningkatkan kapasitas pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- ( 6 ) Meningkatkan kapasitas pemeriksaan dan pengawasan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

## SASARAN STRATEGIS

Adapun sasaran strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2015-2019 berdasarkan identifikasi dan analisis lingkungan strategis adalah **menurunnya indeks risiko bencana di pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi**, dengan indikator kinerja sasaran strategis yang meliputi:

- ( 1 ) Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi kajian risiko bencana;
- ( 2 ) Rata-rata waktu respon kejadian bencana;
- ( 3 ) Prosentase peningkatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca bencana;
- ( 4 ) Prosentase daerah yang memiliki logistik dan peralatan penanggulangan
- ( 5 ) bencana yang memadai; dan
- ( 6 ) Rata-rata waktu penyebaran informasi kejadian bencana.

Selanjutnya berdasarkan tujuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2015-2019, maka sasaran program yang akan dicapai adalah:



## Tujuan 1:

Meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap pengurangan risiko bencana, yang terintegrasi dalam dimensi pembangunan dan kehidupan masyarakat, sasaran programnya adalah meningkatnya kapasitas ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana melalui upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, dengan indikator kinerja sasaran program yang meliputi:

- ( 1 ) Prosentase meningkatnya kapasitas daerah melalui upaya pengurangan risiko bencana;
- ( 2 ) Prosentase meningkatnya kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana;
- ( 3 ) Prosentase meningkatnya kapasitas kesiapsiagaan daerah.

## Tujuan 2:

Meningkatkan keandalan dan kecepatan penanganan darurat bencana, sasaran programnya adalah:

1) Meningkatnya kecepatan respon dan kapasitas sumber daya dalam penanganan darurat bencana, dengan indikator kinerja yang meliputi:

- a) Rata-rata waktu respon kejadian bencana;
- b) Prosentase penyelamatan pertolongan dan evakuasi masyarakat korban bencana;
- c) Prosentase jumlah korban yang selamat akibat bencana;
- d) Jumlah personil penanggulangan bencana yang terlatih dan kompeten.

2) Meningkatnya pelayanan terhadap korban bencana, dengan indikator kinerja yang meliputi:

- a) Prosentase perumusan dan pelaksanaan penempatan pengungsi;
- b) Prosentase perumusan dan pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan pengungsi;
- c) Prosentase perumusan dan pelaksanaan kompensasi dan pengembalian hak pengungsi;
- d) Prosentase pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang terdampak bencana;
- e) Prosentase daerah yang mendapatkan perbaikan sarana dan prasarana vital dan terpulihkan pada kondisi situasi keadaan darurat bencana.

3) Meningkatnya sosialisasi dan diseminasi penanganan darurat bencana kepada pemangku kepentingan, dengan indikator kinerja prosentase penyelenggaraan

pembinaan penanganan darurat melalui sosialisasi peraturan/pedoman di daerah rawan bencana

Tujuan 3:

Memulihkan daerah terdampak bencana melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, sasaran programnya adalah meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat terdampak bencana melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, dengan indikator kinerja sasaran program yang meliputi:

- ( 1 ) Prosentase dokumen perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang memenuhi kriteria;
- ( 2 ) Prosentase pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana bidang fisik; dan
- ( 3 ) Prosentase daerah yang melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi sosial ekonomi pascabencana

Tujuan 4:

Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana sesuai standar minimal yang ditetapkan BNPB, sasaran programnya adalah:

- ( 1 ) Meningkatnya dukungan logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai untuk kesiapsiagaan, dengan indikator kinerja prosentase daerah yang memiliki logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai untuk kesiapsiagaan;
- ( 2 ) Meningkatnya kapasitas tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana, dengan indikator kinerja prosentase daerah yang menerapkan tata kelola logistik dan peralatan.

Tujuan 5:

Meningkatkan kapasitas pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana, sasaran programnya adalah meningkatnya administrasi dan kualitas perencanaan, pelaksanaan anggaran, penatakelolaan Barang Milik Negara (BMN), dan meningkatnya kualitas dan kinerja sumberdaya manusia, dengan indikator kinerja sasaran program yang meliputi:

- ( 1 ) Prosentase perencanaan program dan anggaran prioritas yang terlaksana tepat waktu;
- ( 2 ) Prosentase jumlah daerah yang telah memiliki peraturan daerah penanggulangan bencana;

- ( 3 ) Prosentase peningkatan jumlah kerjasama antar lembaga;
- ( 4 ) Prosentase peningkatan kehadiran pegawai tepat waktu;
- ( 5 ) Rata - rata jumlah pegawai yang mendapatkan pembinaan kepegawaian;
- ( 6 ) Pengelolaan Keuangan dan pelaksanaan anggaran yang tepat waktu dan akuntabel.

Tujuan 6:

Meningkatkan kapasitas pemeriksaan dan pengawasan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, sasaran programnya adalah terwujudnya akuntabilitas dan good governance, dengan indikator kinerja sasaran program yang meliputi:

- ( 1 ) Tingkat penerapan pengendalian internal;
- ( 2 ) Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti;
- ( 3 ) Tingkat akuntabilitas laporan keuangan.

## **2.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD – Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma**

Dalam RPJMD Kabupaten Seluma, Penanggulangan Bencana tercantum kedalam Adapun tujuan yang tercantum yaitu:

- 1 Meningkatkan perlindungan sosial bagi PMKS
- 2 Peningkatan penyelenggaraan penanggulangan bencana

Dengan indikator sasaran yaitu:

- 1 Cakupan korban bencana alam yang mendapatkan bantuan pemenuhan dasar
- 2 Jumlah TRC yang terlatih
- 3 Persentase sekolah Aman bencana di kawasan rawan bencana
- 4 Prosentase fasilitas umum yang terkena dampak bencana dan direhabilitasi

### **VISI DAN MISI**

Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma yaitu

***“Terciptanya masyarakat Kabupaten Seluma yang siap siaga, tanggap dan tangguh dalam menghadapi bencana”***

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah, misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma adalah sebagai berikut:

1. Melindungi masyarakat dari ancaman bencana melalui penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terencana, terpadu dan terkoordinasi.
2. Mengurangi resiko bencana dengan melaksanakan upaya pencegahan dan mitigasi serta kesiapsiagaan menghadapi bencana.
3. Menyelenggarakan tindakan cepat tanggap dalam penanggulangan bencana.
4. Memulihkan dampak bencana menuju kehidupan masyarakat yang stabil, aman dan terkendali.

## **TUJUAN DAN SASARAN**

### **1. Tujuan**

Adapun tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Strategis BPBD 2016 - 2021 yaitu:

- (1) Membangun sistem penanggulangan bencana yang baik untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana.
- (2) Menghindari terjadinya bencana dan mengurangi resiko bencana serta mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana.
- (3) Membangun upaya cepat tanggap dalam melakukan penanggulangan pertolongan saat terjadi bencana.
- (4) Melaksanakan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka pemulihan kehidupan masyarakat

### **2. Sasaran ( Dalam cascading Kinerja)**

- (1) Terbitnya aturan perundangan bagi penanggulangan bencana di Kabupaten Seluma dan adanya sumber daya terpadu dalam penanggulangan bencana.
- (2) Berkurangnya risiko terhadap ancaman bencana.
- (3) Menghindari kemungkinan bertambahnya korban bencana.
- (4) Pulihnya kehidupan masyarakat pasca bencana.

### **3. Indikator dalam Cascading Kinerja BPBD Kabupaten Seluma Tahun 2018 :**

- (1) Cakupan korban Bencana yang mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dengan target 100,00 persen.
- (2) Jumlah kegiatan penunjang operasional BPBD dengan target sebesar 15 kegiatan penunjang.
- (3) Jumlah laporan kepegawaian dengan target 12 Dokumen
- (4) Jumlah sarana dan prasarana pendukung kegiatan penanggul;angan bencana dengan target sebesar 9 kegiatan.
- (5) Jumlah TRC yang terlatih dengan target 25 orang

- (6) Penanganan cepat tanggap bencana dengan target sebesar 12 bulan
- (7) Peningkatan kualitas pelaporan keuangan, kinerja dan perencanaan dengan target 3 dokumen.
- (8) Persentase sekolah aman bencana di kawasan rawan bencana dengan target sebesar 22,78 persen.

Kebijakan penanggulangan bencana di Indonesia diatur terutama melalui Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan peraturan-peraturan pemerintah serta peraturan presiden turunan dari Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007.

Adapun ringkasan/ikhtisar kinerja tahun 2018 yang berisi program dan kegiatan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran BPBD Tahun 2018, tersaji dalam uraian sebagai berikut:

1. Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018

Tabel 2.1. Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran BPBD Tahun 2018

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH ( Rp )		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	( Rp )	%
5	<b>BELANJA</b>	5.451.050.000,00		5.451.050.000,00	
5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	3.105.553.250,00		3.105.553.250,00	
5.1.1	Belanja Pegawai	3.105.553.250,00		3.105.553.250,00	
5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	2.35.96.750,00		2.35.96.750,00	
5.2.1	Belanja Pegawai	17.748.750,00		17.748.750,00	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.932.748.750,00		1.932.748.750,00	
5.2.3	Belanja Modal	395.000.000,00		395.000.000,00	
		(5.451.050.000,00)		(5.451.050.000,00)	

(Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD BPBD 2018)

- A. Belanja Tidak Langsung, terdiri dari Belanja Pegawai berupa *gaji pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Jabatan, Tunjangan fungsional umum, Tunjangan beras, Tunjangan PPH Tunjangan khusus, Pembulatan gaji, iuran asuransi kesehatan, Iuran Asuransi Kematian, Iuran Asuransi Kecelakaan Kerja dan Tambahan Perbaikan Penghasilan.*  
( Lampiran I )
- B. Belanja Langsung, terdiri dari 6 (Enam) program ( Lampiran 2 ) yaitu:
  - 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dirinci dalam 15 Kegiatan.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dirinci dalam 2 Kegiatan
  3. Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dirinci 2 kegiatan
  4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dirinci dalam 1 kegiatan
  5. Program Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, dirinci 1 kegiatan
  6. Program pencegahan dan penanggulangan bencana, dirinci 7 Kegiatan
2. Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Tahun 2018

Tabel 2.2 Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan BPBD Tahun 2018

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH ( Rp )		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	( Rp )	%
5	<b>BELANJA</b>	5.451.050.000,00	4.650.868.850,00	(800.181.150,00)	(14,68)
5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	3.105.553.250,00	2.330.572.500,00	(774.980.750,00)	(24,95)
5.1.1	Belanja Pegawai	3.105.553.250,00	2.330.572.500,00	(774.980.750,00)	(24,95)
5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	2.35.96.750,00	2.320.296.350,00	(25.200.400,00)	(1,07)
5.2.1	Belanja Pegawai	17.748.750,00	19.448.000,00	1.700.000,00	9,58
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.932.748.750,00	2.090.0.350,00	157.299.600,00	8,14
5.2.3	Belanja Modal	395.000.000,00	210.00.000,00	(184.200.000,00)	(46,63)
		(5.451.050.000,00)	(4.650.868.850,00)	800.181.150,00	(14,68)

(Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan SKPD BPBD 2018)

- A. Belanja Tidak Langsung, terdiri dari Belanja Tidak Langsung, terdiri dari *Belanja Pegawai berupa gaji pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Jabatan, Tunjangan fungsional umum, Tunjangan beras, Tunjangan PPHTunjangan khusus, Pembulatan gaji, iuran asuransi kesehatan, Iuran Asuransi Kematian, Iuran Asuransi Kecelakaan Kerja dan Tambahan Perbaikan Penghasilan.*
- ( Lampiran 3 )
- B. Belanja Langsung, terdiri dari 6 (enam) program yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dirinci dalam 15 Kegiatan.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dirinci dalam 2 Kegiatan
3. Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dirinci 2 kegiatan
4. Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dirinci dalam 1 kegiatan
5. Program Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan social, dirinci 1 kegiatan



### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **III.I. Capaian Kinerja BPBD**

Capaian kinerja BPBD untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi seusi dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi tahun 2018.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2017, tahun 2018 dan 2019
3. Membandingkan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2018 dengan target Renstra 2016 – 2021.
4. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2018 dengan BNPB
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan dan penurunan kinerja serta alternatif pemecahan masalah
6. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya manusia, anggaran, barang dan jasa.
7. Analisis program/kegiatan penunjang keberhasilan ataupun kegagalann pencapaian target kinerja.

##### **III.I.1. Perbandingan Target dan Realisasi tahun 2018**

Adapun perbandingan target dan realisasi kinerja BPBD Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1. Perbandingan Target dan realisasi kinerja BPBD Tahun 2018

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	Terbitnya aturan perundangan bagi penanggulangan bencana	Jumlah aturan kebencanaan yang ditetapkan	3 Peraturan	0	0,00	Tidak terdapat anggaran khusus
2	Adanya sumber daya terpadu dalam penanggulangan bencana	Jumlah belanja materai dan benda pos lainnya	1200 Lembar	1200 Lembar	100	
		Jumlah belanja jasa telpon, listrik dan internet	12 Bulan	12 Bulan		
		Jumlah kendaraan operasional	7 UNIT Roda 4 dan 8 Unit Roda 2	7 UNIT Roda 4 dan 8 Unit Roda 2	100	
		Jumlah ASN yang mengikuti DIKLAT Formal	7 Orang ASN	7 Orang ASN	100	Novita, Reza, Eko, Novi, Rita, Reza, Fauzan
		Jumlah petugas kebersihan	2 Orang	2 Orang	100	
		Jumlah perawatan dan perbaikan AC,printer,laptop dan pc	11 Unit	11 Unit	100	
		Jumlah penyediaan alat tulis kantor	1 Tahun	1 Tahun	100	
		Jumlah barang cetakan dan pengandaann	41 Rim	41 Rim	100	
		Jumlah komponen instalasi listrik	40 Pcs	40 pcs	100	
		Jumlah peralatan rumah tangga	1 Paket	1 Paket	100	
		Jumlah belanja makanan dan minuman	923 Kotak/Bungkus	923 Kotak/Bungkus	100	
		Jumlah rapat-rapat kordinasi	18 kali perjalanan dinas luar daerah dan 12 kali perjalanan dinas dalam daerah	24 Kali Perjalanan dinas	100	Penambahan Anggaran dalam APBD Perubahan

3	Berkurangnya resiko terhadap ancaman bencana	Jumlah desa tangguh bencana	2 (dua ) desa tangguh bencana	1 Desa Tangguh Bencana	50	Pengurangan Anggaran sebesar Rp 50.000.000
		Jumlah sekolah aman bencana yang terbentuk	3 ( Tiga ) Sekolah	3 ( Tiga ) Sekolah	100	
		Jumlah koordinasi terpadu	1 (satu) kali	1 (satu) kali	100	
		Jumlah Simulasi yang dilakukan	1 ( satu) kali	1 ( satu) kali	100	APBD Perubahan 2018
4	Menghindari kemungkinan bertambahnya korban bencana	Jumlah Penanganan masalah strategis	3 (Tiga) kali	7 (Tujuh ) Kali	233	Ds Air Teras, Ds Penago Baru, Ds Talang Alai, Kapal Tenggelam Psr Ngalam, Org Tenggelam Bendung Seluma, Ds Sukamerindu, Ds Padang Bakung
		Jumlah logistik yang disalurkan	134 Paket	134 Paket	100	
		Jumlah personil Pusdalops	10 (Sepuluh ) Orang	10 (Sepuluh ) Orang	100	
5	Pulihnya kehidupan masyarakat	Jumlah Proposal Penanganan Pasca Bencana	1 (Satu) Proposal	1 (Satu) Proposal	100	Diajukan ke BNPB dan Kemendes DTT
		Jumlah laporan Inventarisasi dan identifikasi	24 (Duapuluh empat) Laporan	6 (enam) Laporan	25	Ds Sukamerindu, Ds Lubuk Lagan, Ds Dusun Tengah, Ds Taba, Ds Jambat Akar, Ds Cawang

### III.I.2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja 2017 dan 2018

Tabel 3.2 Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2017 dan 2018

No	Sasaran	Indikator Kinerja	2017	2018	2019
1	Terbitnya peraturan perundangan bagi penanggulangan bencana dan adanya sumber daya terpadu dalam penanggulangan bencana	1. Jumlah sumber daya pendukung pelayanan perkantoran	100 %	100 %	
		2. Jumlah rehabilitasi sedang/berat kantor	0 %	100 %	
		3. Jumlah pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	100 %	
		4. Jumlah laporan DUK dan Analisa kepegawaian	100 %	100 %	
		5. Jumlah ASN yang mengikuti DIklat	100 %	100 %	
		6. Jumlah Dokumen Renja, Renstra, RKA, DPA, RKPA dan DPPA	100 %	100 %	
2	Berkurangnya risiko terhadap ancaman bencana	1. Jumlah desa Tangguh bencana yang terbentuk	100 %	50 %	
		2. Jumlah relawan yang terlatih	100 %	100 %	
		3. Jumlah rambu yang terpasang	0 %	0 %	
		4. Jumlah peta risiko bencana yang terupdate	0 %	0 %	
		5. Jumlah peserta penyusunan standar	0 %	0 %	
3	Menghindari kemungkinan bertambahnya korban bencana	1. Jumlah penanganan ketanggapdaruratan yang dilakukan	100 %	100 %	
		2. Jumlah pelatihan Tagana dan Dapur umum	0 %	0 %	
		2. Jumlah logistik yang disalurkan	100 %	100 %	
4	Pulihnya kehidupan masyarakat pasca bencana	1. Jumlah penanganan rehabilitas/turap/bronjong	0 %	0 %	
		2. Jumlah laporan yang terinterventarisir dan teridentifikasi	100 %	25 %	
		3. Jumlah laporan yang dikaji kebutuhan pasca bencana	100 %	100 %	

**III.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Renstra BPBD**
**Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi kinerja Tahun 2018 dengan Renstra BPBD Tahun 2016 -2021**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	s/d 2018	Renstra 2016 - 2021
1	Terbitnya peraturan perundangan bagi penanggulangan bencana dan adanya sumber daya terpadu dalam penanggulangan bencana	1. Jumlah sumber daya pendukung pelayanan perkantoran	100 %	100 %
		2. Jumlah rehabilitasi sedang/berat kantor	3 Unit Gedung	4 Unit gedung
		3. Jumlah pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	100 %
		4. Jumlah laporan DUK dan Analisa kepegawaian	0 %	100 %
		5. Jumlah ASN yang mengikuti DIKlat	25 Orang	100 Orang
		6. Jumlah Dokumen Renja, Renstra, RKA, DPA, RKPA dan DPPA	50 %	100 %
2	Berkurangnya risiko terhadap ancaman bencana	1. Jumlah desa Tangguh bencana yang terbentuk	9 Desa	24 Desa
		2. Jumlah relawan yang terlatih	100 %	100 %
		3. Jumlah rambu yang terpasang	150 Unit	200 Unit
		4. Jumlah peta risiko bencana yang terupdate	0 Peta	1 Peta Risiko
3	Menghindari kemungkinan bertambahnya korban bencana	1. Jumlah penanganan ketanggapdaruratan yang dilakukan	40 %	100 %
		2. Jumlah logistik yang disalurkan	40 %	100 %
4	Pulihnya kehidupan masyarakat pasca bencana	1. Jumlah penanganan rehabilitas/turap/bronjong	80 %	100 %
		2. Jumlah laporan yang terinterventarisir dan teridentifikasi	50 %	100 %
		3. Jumlah laporan yang dikaji kebutuhan pasca bencana	100 %	100 %

III.I.4. Standar pelayanan kinerja sub urusan bencana di jabarkan dalam landasan hukum yang diatur dalam Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang penerapan standar pelayanan minimal dan Permendagri No 101 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Kabupaten/Kota. Adapun rincian kegiatan dalam Permendagri No 10 Tahun 2018 adalah:

- (1) Pelayanan Informasi Rawan Bencana
- (2) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana
- (3) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Adapun sub kegiatan dan indikator sasaran dapat terlihat dalam Lampiran Standar pelayanan dasar Sub Urusan Bencana Daerah

**III.I.5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan**

Dalam melaksanakan realisasi program/kegiatan dalam tahun anggaran 2018 masih terdapat beberapa hal yang harus dievaluasi, antara lain:

1. Adaptasi pejabat/pelaksana kegiatan yang terlalu lama.
2. Terlalu singkatnya waktu perencanaan kebutuhan dalam kegiatan.
3. Ketidakjelasan proses pengajuan keuangan di BPKD dengan alasan sumber pendanaan PAD.
4. Keterlambatan penerbitan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah

**III.I.6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.**

Sumber daya yang dipergunakan dan terlibat dalam realisasi kegiatan antara lain difokuskan dalam program pencegahan dan penanggulangan bencana. Selain itu beberapa program/kegiatan dapat dianalisa sebagai berikut:

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan total anggaran Rp 917.180.800,00 (APBD 2018) menjadi Rp 1.067.153.200,00 dengan penambahan sebesar Rp 149.972.400,00 ( Penambahan 16,35 %), di akhir tahun 2018, realisasi Rp 1.035.651.409 ( 94.63 % )  
Sisa anggaran diperoleh dari kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan total anggaran Rp 590.488.400,00 (APBD 2018). Pada APBD perubahan 2018, terjadi pengurangan sebesar Rp Rp 395.000.000,00 (66,89).



Adapun kegiatan yang mengalami penundaan yaitu pengadaan Kendaraan dinas/operasional berupa Pengadaan Kendaraan Truk Tangki Air 5000 Liter berjumlah 1 (satu) unit.

Kinerja kegiatan ini ditunjukkan dari Rehabilitasi gedung kantor BPBD sebanyak 1 Unit.

- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan total anggaran Rp 69.9999.900,00 (APBD 2018). Pada perubahan anggaran terdapat penambahan sebesar Rp 94.999.900,00. Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Formal dengan anggaran sebesar Rp 20.000.000,00 dengan target kinerja 7 orang ASN mengikuti Pelatihan Pengadan Barang/Jasa dan manajemen kebencanaan

No	Nama ASN	Jenis Diklat
1	Dodi Hartono. S.IP	Diklat Penyusunan HPS – Pengadaan Barang/Jasa
2	Novita Eka Irianti. M.Si	Diklat Penyusunan HPS – Pengadaan Barang/Jasa
3	M. Eko Ardiyanto. ST	Diklat Penyusunan HPS – Pengadaan Barang/Jasa
4	Novi Sagita. S.IP	Diklat Penyusunan HPS – Pengadaan Barang/Jasa
5	Rita Lediana. S.IP	Diklat Penyusunan HPS – Pengadaan Barang/Jasa
6	Azwandi. SE	Diklat Keuangan
7	Reza Muftadi. S.IP	Diklat Jitu Pasma

Sedangkan Kegiatan Bimtek SKPD berupa Pelatihan TRC dengan target 25 Orang tidak terlaksana.

- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan total anggaran sebesar Rp 10.000.000,00 dan mengalami penambahan APBD 2018 menjadi Rp 10.000.000,00 (100,00 %). Realisasi keuangan pada akhir ahun 2017 adalah sebesar Rp 13.400.000,00 atau sebesar 89,33 %. Penanggung jawab kegiatan ini dilakukan oleh 1 (satu ) orang. Adapun output yang dihasilkan adalah

No	Jenis Dokumen	Jumlah Dokumen
1	DPA 2018	1 (Satu)
2	RKA DPA Perubahan 2018	1 (Satu)
3	LAKIP 2017	1 (satu)

4	DPA Perubahan 2018	1 (satu)
5	Laporan TEPPRA	12 Dokumen
6	RKA 2019	1 Dokumen
7	Laporan Triwulan	4 Dokumen
8	Laporan Realisasi	12 Dokumen
9	Laporan Keuangan	12 Dokumen

- 5) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, dengan total anggaran sebesar Rp 122.005.800,00 dan mengalami pengurangan anggaran di Sub kegiatan Sewa Alat Berat Sebesar Rp 60.000.000,00 ( 49,18 %).
- 6) Program Pencegahan dan Penanggulangan Bencana, dengan total anggaran Rp 635.821.850,00 dan mengalami penambahan sebesar Rp 244.827.200,00 (38,51 %) menjadi Rp 880.649.050,00. Kegiatan awal sebanyak 7 (tujuh) kegiatan, kemudian dalam anggaran perubahan bertambah menjadi 9 (Sembilan) kegiatan.

**Fasilitasi Pembentukan Desa Tangguh Bencana** dengan target awal 2 desa dengan anggaran sebesar Rp 99.996.000,00 berkurang menjadi 1 desa dengan anggaran sebesar Rp 50.000.000,00. Adapun lokasi yang dibentuk adalah Desa Padang Bakung – Kecamatan Semidang Alas Maras

**Pengelolaan Manajemen logistik dan peralatan penanggulangan bencana** dengan anggaran sebesar Rp 180.000.000,00 bertambah menjadi Rp 255.000.000,00 (41,67 %). Adapun penambahan berupa Belanja Modal Peralatan Selam.

**Fasilitasi pelaksanaan pembangunan pasca bencana**, dengan anggaran sebesar Rp 100.000.000,00 dengan realisasi 100 %

**Inventarisasi dan Identifikasi kerusakan dan kerugian akibat bencana**, dengan anggaran sebesar Rp 49.499.800,00 dengan realisasi 100 %

**Pembentukan Sekolah Aman Bencana**, dengan anggaran sebesar Rp 50.000.000,00, target kinerja 3 sekolah, realisasi 100 %.

**Pengelolaan Manajemen Operasional PUSDALOPS**, dengan anggaran sebesar Rp 126.326.050,00, dengan target 10 orang, realisasi 100 %

**Koordinasi dan fasilitasi penanggulangan bencana**, dengan anggaran awal sebesar Rp 30.000.000,00 bertambah sebesar Rp 41.446.800,00 ( 38,16 %).

**Pengelolaan shelter**, dengan anggaran sebesar Rp 58.376.400,00 merupakan kegiatan yang baru dimasukkan ke proses perubahan dengan target Perbaikan dan Perawatan Shelter Desa Rawa Indah.

**Simulasi Kesiapsiagaan**, dengan anggaran sebesar Rp 150.000.000,00, merupakan kegiatan yang baru dimasukkan dalam proses perubahan dengan target 178 Peserta ( 13 Desa) yang di fokuskan di Desa Pasar Seluma ( Kec Seluma Selatan)

#### III.I.7. Analisis program/kegiatan yang menunjang

Beberapa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan kegiatan utama BPBD antara lain belanja pendidikan dan pelatihan formal, belanja perjalanan dinas dalam daerah, belanja makanan dan minuman kegiatan serta program lainnya.

Sedangkan program/kegiatan yang mengalami kegagalan pencapaian kinerja lebih disebabkan pada pengurangan anggaran yang terjadi pada hampir seluruh OPD dan beberapa Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan terlalu lambat beradaptasi dengan program/kegiatan.

Program Pencegahan dan penanggulangan Bencana harus mendapat proporsi anggaran yang lebih besar mengingat kinerja utama penanggulangan bencana berada pada program ini. Selain itu, Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur juga harus menjadi program rutin sebagai bagian dari peningkatan kualitas kapasitas ASN dalam menghadapi bencana

#### III.II. Realisasi Anggaran

Dalam ringkasan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah untuk Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial pada Unit Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2018, disajikan dalam tabel 3. berikut:

Secara keseluruhan, realisasi belanja pada akhir tahun 2018 adalah sebesar Rp **4.167.326.774,00 ( Empat Milyar Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Dua puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah)** atau sebesar **89,60 %**

Tabel Realisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun 2018

PROGRAM & KEGIATAN	PAGU ANGGARAN		REALISASI ( Rp 000)	PERSENTASE CAPAIAN
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>2.345.496.750,00</b>	<b>2.320.296.350,00</b>	<b>2.195.807.637,00</b>	<b>94,63</b>
<b>1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>917.180.800,00</b>	<b>1.067.153.200,00</b>	<b>1.035.651.409,00</b>	<b>97,05</b>
1.1. Penyediaan jasa surat menyurat	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	100,00
1.2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	54.000.000,00	58.800.000,00	42.089.709,00	77,39
1.3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	222.800.000,00	232.800.000,00	222.608.500,00	99,47
1.4. Penyediaan jasa administrasi keuangan	44.520.000,00	44.520.000,00	44.520.000,00	100,00
1.5. Penyediaan jasa kebersihan kantor	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00
1.6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
1.7. Penyediaan alat tulis kantor	41.999.200,00	41.999.200,00	41.999.200,00	100,00
1.8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	14.998.600,00	24.998.000,00	24.998.000,00	100,00
1.9. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
1.10. Penyediaan peralatan rumah tangga	14.968.000,00	24.968.000,00	24.968.000,00	100,00
1.11. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	8.000.000,00	8.000.000,00	6.800.000,00	85,00
1.12. Penyediaan Makanan dan Minuman	29.995.000,00	45.168.000,00	45.068.000,00	99,78

**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi**
**2018**

1.13. Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi	150.000.000,00	235.000.000,00	235.000.000,00	100,00
1.14. Penyediaan jasa Administrasi umum dan perkantoran	262.800.000,00	262.800.000,00	259.500.000,00	98,74
1.15. Penyediaan jasa publikasi dan dokumentasi	14.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00	100,00
<b>2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>590.488.400,00</b>	<b>195.488.400,00</b>	<b>183.548.367,00</b>	<b>93,89</b>
2.1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	440.488.400,00	45.488.400,00	37.508.600,00	82,46
2.2. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	150.000.000,00	150.000.000,00	146.039.767,00	97,36
<b>3. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>69.999.900,00</b>	<b>94.999.900,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>31,58</b>
3.1. Pendidikan dan pelatihan formal	20.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
3.2. Bimtek SKPD	49.999.900,00	64.999.900,00	-	-
<b>4. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>19.991.300,00</b>	<b>99,96</b>
4.1. Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Keuangan	10.000.000,00	20.000.000,00	19.991.300,00	99,96
<b>5. PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL</b>	<b>122.005.800,00</b>	<b>62.005.800,00</b>	<b>62.005.800,00</b>	<b>100,00</b>

5.1. Penanganan Masalah - Masalah Strategis Yang menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa	122.005.800,00	62.005.800,00	62.005.800,00	100,00
<b>6. PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b>635.821.850,00</b>	<b>880.649.050,00</b>	<b>864.610.761,00</b>	<b>98,18</b>
6.1. Fasilitasi Pembentukan Desa Tangguh Bencana	99.996.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
6.2. Pengelolaan Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana	180.000.000,00	255.000.000,00	238.961.861,00	93,71
6.3. Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Pasca Bencana	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
6.4. Inventarisasi dan Identifikasi Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana	49.499.800,00	49.499.800,00	49.499.800,00	100,00
6.5. Pembentukan Sekolah Aman Bencana	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
6.6. Pengelolaan Manajemen Operasional PUSDALOPS	126.326.050,00	126.326.050,00	126.326.050,00	100,00
6.7. Koordinasi dan Fasilitasi Penanggulangan Bencana	30.000.000,00	41.446.800,00	41.446.800,00	100,00
6.8. Pengelolaan Shelter		58.376.400,00	58.376.250,00	100,00
6.9. Simulasi Kesiapsiagaan	-	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **IV.1. KESIMPULAN**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2018 merupakan media akuntabilitas kinerja SKPD dan sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban SKPD dalam melayani masyarakat di bidang penanggulangan bencana.

Pencapaian kinerja berdasarkan Rencana Strategis 2016 – 2021 agak terhambat mengingat keterbatasan anggaran Pemerintah Kabupaten Seluma.

Hasil evaluasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma tahun 2018 memperlihatkan hasil yang baik. Hal ini setidaknya menunjukkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya secara baik.

#### **IV.2. LANGKAH-LANGKAH ANTISIPATIF/ PEMECAHAN MASALAH**

Dalam mencapai kinerja organisasi ke depan diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Perlu meningkatkan sosialisasi mengenai penanggulangan bencana.
2. Meningkatkan pendidikan dan latihan baik aparatur maupun masyarakat terutama pelajar yang dapat membantu mengenai penanggulangan bencana.
3. Lebih meningkat koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan antara BPBD Kabupaten Seluma dengan OPD Kabupaten Seluma lainnya.
4. Lebih meningkatkan koordinasi, baik dengan BPBD Provinsi Bengkulu maupun dengan BNPB dan Kementerian Lain
5. Meningkatkan pembinaan dan penyuluhan di daerah rawan bencana.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja berikutnya.

Seluma, Februari 2019

Kepala Pelaksana  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Seluma

**ARBEN MUKTIAR. M. Si**  
NIP. 19720625 200312 1002

Tabel 3.1. Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2018

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	Terbitnya aturan perundangan bagi penanggulangan bencana	Jumlah aturan kebencanaan yang ditetapkan	3 Peraturan	0	0,00	Tidak terdapat anggaran khusus
2	Adanya sumber daya terpadu dalam penanggulangan bencana	Jumlah belanja materai dan benda pos lainnya	1200 Lembar	1200 Lembar	100,00	
		Jumlah belanja jasa telpon, listrik dan internet	12 Bulan	12 Bulan		
		Jumlah kendaran oprasional	7 UNIT Roda 4 dan 8 Unit Roda 2	7 UNIT Roda 4 dan 8 Unit Roda 2	100,00	
		Jumlah pengadaan kendaraan operasional	7 Orang ASN			
		Jumlah petugas kebersihan	2 Orang	2 Orang	100,00	
		Jumlah perawatan dan perbaikan AC,printer,laptop dan pc	11 Unit	11 Unit	100,00	
		Jumlah penyediaan alat tulis kantor	1 Tahun	1 Tahun	100,00	
		Jumlah barang cetakan dan pengandaann	41 Rim	41 Rim	100,00	
		Jumlah komponen instalasi listrik	40 Pcs	40 pcs	100,00	
		Jumlah peralatan rumah tangga	1 Paket	1 Paket	100,00	
		Jumlah belanja makanan dan minuman	923 Kotak/Bungkus	923 Kotak/Bungkus		
		Jumlah rapat-rapat kordinasi	18 kali perjalanan dinas luar daerah dan 12 kali perjalanan dinas dalam daerah	24 Kali Perjalanan dinas	100,00	Penambahan Anggaran dalam APBD Perubahan
3	Berkurangnya resiko terhadap ancaman bencana	Jumlah desa tangguh bencana	2 (dua ) desa tangguh bencana	1 Desa Tangguh Bencana	50,00	
		Jumlah sekolah aman bencana yang terbentuk	3 ( Tiga ) Sekolah	3 ( Tiga ) Sekolah	100,00	
		Jumlah koordinasi terpadu	1 (satu) kali	1 (satu) kali	100,00	
		Jumlah Simulasi yang dilakukan	1 ( satu) kali	1 ( satu) kali	100,00	APBD Perubahan 2018
4	Menghindari kemungkinan bertambahnya korban bencana	Jumlah Penanganan masalah strategis	3 (Tiga) kali	7 (Tujuh ) Kali	233,33	Ds Air Teras, Ds Penago Baru, Ds Talang Alai, Kapal Tenggelam Psr Ngalam, Org Tenggelam Bendung Seluma, Ds Sukamerindu, Ds Padang Bakung
		Jumlah logistik yang disalurkan	134 Paket	134 Paket	100,00	
		Jumlah personil PUSDALOPS	10 (Sepuluh ) Orang	10 (Sepuluh ) Orang	100,00	
5	Pulihnya kehidupan masyarakat	Jumlah Proposal Penanganan Pasca Bencana	1 (Satu) Proposal	1 (Satu) Proposal	100,00	Diajukan ke BNPB dan Kemendes DTT
		Jumlah laporan Inventarisasi dan Identifikasi	24 (Duapuluh empat) Laporan	6 (enam) Laporan	25,00	Ds Sukamerindu, Ds Lubuk Lagan, Ds Dusun Tengah, Ds Taba, Ds Jambat Akar, Ds Cawang



Urusan Pemerintahan :  
Organisasi :  
Sub Unit Organisasi :  
Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Anggaran :  
Bendahara Pengeluaran :  
Tahun Anggaran :

PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA  
LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN-BULAN DESEMBER  
TAHUN ANGGARAN 2018

1.06 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR - SOSIAL  
1.06.02 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
1.06.02.01 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
DRS MUHPHAN A  
RITA LEDIANA, S.IP  
2018

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN		REALISASI									SISA ANGGARAN
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	S/D Bulan Lalu			Bulan Ini			S/D Bulan Ini			
				Fisik %	Keuangan (Rp)	Keuangan %	Fisik %	Keuangan (Rp)	Keuangan %	Fisik %	Keuangan (Rp)	Keuangan %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	BELANJA	5.451.050.000	4.650.868.850	65,60	3.575.871.383,00	65,60	12,72	591.455.391,00	12,72	89,60	4.167.326.774,00	89,60	483.542.076
							-			-			
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.105.553.250	2.330.572.500	57,64	1.789.943.487,00	57,64	7,79	181.575.650,00	7,79	84,59	1.971.519.137,00	84,59	359.053.363
	BELANJA PEGAWAI	3.105.553.250	2.330.572.500	57,64	1.789.943.487,00	57,64	7,79	181.575.650,00	7,79	65,43	1.971.519.137,00	65,43	359.053.363
	Gaji dan Tunjangan	3.105.553.250	2.330.572.500	57,64	1.789.943.487,00	57,64	7,79	181.575.650,00	7,79	65,43	1.971.519.137,00	65,43	359.053.363
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.354.323.250,00	1.004.323.250,00	87,80	881.834.000,00	87,80	6,47	65.028.600,00	6,47	94,28	946.862.600,00	94,28	57.460.650
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	150.000.000,00	135.000.000,00	68,17	92.022.772,00	68,17	4,91	6.631.966,00	4,91	73,08	98.654.738,00	73,08	36.345.262
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural	170.000.000,00	155.000.000,00	76,25	118.190.000,00	76,25	5,66	8.780.000,00	5,66	81,92	126.970.000,00	81,92	28.030.000
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	60.000.000,00	30.000.000,00	63,52	19.055.000,00	63,52	4,32	1.295.000,00	4,32	67,83	20.350.000,00	67,83	9.650.000
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	110.000.000,00	75.000.000,00	70,01	52.504.500,00	70,01	5,99	4.490.040,00	5,99	75,99	56.994.540,00	75,99	18.005.460
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	15.000.000,00	15.000.000,00	9,97	1.495.659,00	9,97	-	-	-	9,97	1.495.659,00	9,97	13.504.341
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	30.000,00	30.000,00	41,46	12.438,00	41,46	3,17	950,00	3,17	44,63	13.388,00	44,63	16.612
5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	55.000.000,00	45.000.000,00	55,05	24.774.478,00	55,05	4,78	2.149.817,00	4,78	59,83	26.924.295,00	59,83	18.075.705
5.1.1.01.22	Iuran Asuransi Kematian	6.000.000,00	7.000.000,00	68,35	4.784.766,00	68,35	6,69	468.208,00	6,69	75,04	5.252.974,00	75,04	1.747.026
5.1.1.01.23	Iuran Asuransi Kecelakaan Kerja	5.000.000,00	4.000.000,00	44,87	1.794.874,00	44,87	3,90	156.069,00	3,90	48,77	1.950.943,00	48,77	2.049.057
5.1.1.01.24	Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)	1.180.200.000,00	860.219.250,00	68,99	593.475.000,00	68,99	10,76	92.575.000,00	10,76	79,75	686.050.000,00	79,75	174.169.250
	BELANJA LANGSUNG	2.345.496.750,00	2.320.296.350,00	76,97	1.785.927.896,00	76,97	17,66	409.879.741,00	17,66	94,63	2.195.807.637,00	94,63	124.488.713
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	917.180.800,00	1.067.153.200,00	90,49	965.625.179,00	90,49	6,56	70.026.230,00	6,56	97,05	1.035.651.409,00	97,05	31.501.791
	Penyediaan jasa surat menyurat	5.100.000,00	5.100.000,00	91,67	4.675.000,00	91,67	8,33	425.000,00	8,33	100,00	5.100.000,00	100,00	-
5.2.2.01.04	Belanja materai benda Pos lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	87,50	2.625.000,00	87,50	12,50	375.000,00	12,50	100,00	3.000.000,00	100,00	-
5.2.2.01.04	Benda Pos lainnya	2.100.000,00	2.100.000,00	97,62	2.050.000,00	97,62	2,38	50.000,00	2,38	100,00	2.100.000,00	100,00	-
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	54.000.000,00	58.800.000,00	71,16	38.424.479,00	71,16	6,23	3.665.230,00	6,23	77,39	42.089.709,00	77,39	16.710.291
5.2.2.03.01	Belanja Telepon	840.000,00	840.000,00	78,20	656.902,00	78,20	6,85	57.500,00	6,85	85,05	714.402,00	85,05	125.598
5.2.2.03.03	Belanja Listrik	44.400.000,00	48.000.000,00	60,47	29.025.219,00	60,47	5,65	2.711.230,00	5,65	66,12	31.736.449,00	66,12	16.263.551
5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	8.760.000,00	9.960.000,00	87,77	8.742.358,00	87,77	9,00	896.500,00	9,00	96,78	9.638.858,00	96,78	321.142
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	222.800.000,00	232.800.000,00	89,52	199.457.566,00	89,52	9,94	23.150.934,00	9,94	99,47	222.608.500,00	99,47	10.191.500
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	29.750.000,00	29.750.000,00	95,38	28.375.000,00	95,38	4,62	1.375.000,00	4,62	100,00	29.750.000,00	100,00	-
5.2.2.05.02	Belanja Pengantian Suku Cadang	22.500.000,00	32.500.000,00	73,08	23.750.000,00	73,08	26,92	8.750.000,00	26,92	100,00	32.500.000,00	100,00	-
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	147.600.000,00	147.600.000,00	93,64	138.215.066,00	93,64	6,36	9.384.934,00	6,36	100,00	147.600.000,00	100,00	-
5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	3.200.000,00	3.200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.200.000
5.2.2.05.05	Belanja jasa Pajak Kendaraan Bermotor	19.750.000,00	19.750.000,00	46,16	9.117.500,00	46,16	18,44	3.641.000,00	18,44	64,60	12.758.500,00	64,60	6.991.500
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	44.520.000,00	44.520.000,00	93,89	41.800.000,00	93,89	6,11	2.720.000,00	6,11	100,00	44.520.000,00	100,00	-
5.2.2.03.09	Belanja Jasa Administrasi Keuangan/Barang	44.520.000,00	44.520.000,00	93,89	41.800.000,00	93,89	6,11	2.720.000,00	6,11	100,00	44.520.000,00	100,00	-
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	24.000.000,00	100,00	-	-	-	100,00	24.000.000,00	100,00	-
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kebersihan/ Cleaning Service	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	24.000.000,00	100,00	-	-	-	100,00	24.000.000,00	100,00	-
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	15.000.000,00	15.000.000,00	86,67	13.000.000,00	86,67	13,33	2.000.000,00	13,33	100,00	15.000.000,00	100,00	-
5.2.2.20.04	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	15.000.000,00	15.000.000,00	86,67	13.000.000,00	86,67	13,33	2.000.000,00	13,33	100,00	15.000.000,00	100,00	-
	Penyediaan alat tulis kantor	41.999.200,00	41.999.200,00	88,09	36.999.000,00	88,09	11,91	5.000.200,00	11,91	100,00	41.999.200,00	100,00	-
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	41.999.200,00	41.999.200,00	88,09	36.999.000,00	88,09	11,91	5.000.200,00	11,91	100,00	41.999.200,00	100,00	-
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	14.998.600,00	24.998.000,00	58,80	14.698.384,00	58,80	41,20	10.299.616,00	41,20	100,00	24.998.000,00	100,00	-
5.2.2.06.01	Belanja cetak	10.586.600,00	18.578.800,00	58,61	10.889.634,00	58,61	41,39	7.689.166,00	41,39	100,00	18.578.800,00	100,00	-
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	4.412.000,00	6.419.200,00	59,33	3.808.750,00	59,33	40,67	2.610.450,00	40,67	100,00	6.419.200,00	100,00	-
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	15.000.000,00	100,00	-	-	-	100,00	15.000.000,00	100,00	-
5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	15.000.000,00	100,00	-	-	-	100,00	15.000.000,00	100,00	-
	Penyediaan peralatan rumah tangga	14.968.000,00	24.968.000,00	91,99	22.968.000,00	91,99	8,01	2.000.000,00	8,01	100,00	24.968.000,00	100,00	-
5.2.2.02.09	Belanja Peralatan Rumah Tangga	14.968.000,00	24.968.000,00	91,99	22.968.000,00	91,99	8,01	2.000.000,00	8,01	100,00	24.968.000,00	100,00	-
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	8.000.000,00	8.000.000,00	85,00	6.800.000,00	85,00	-	-	-	85,00	6.800.000,00	85,00	1.200.000
5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	8.000.000,00	8.000.000,00	85,00	6.800.000,00	85,00	-	-	-	85,00	6.800.000,00	85,00	1.200.000
										-			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN		REALISASI									SISA ANGGARAN
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	S/D Bulan Lalu			Bulan Ini			S/D Bulan Ini			
				Fisik %	Keuangan (Rp)	Keuangan %	Fisik %	Keuangan (Rp)	Keuangan %	Fisik %	Keuangan (Rp)	Keuangan %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Penyediaan Makanan dan Minuman	29.995.000,00	45.168.000,00	77,49	35.002.000,00	77,49	61,44	10.066.000,00	22,29	99,78	45.068.000,00	99,78	100.000
5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian	11.884.000,00	19.992.000,00	67,03	13.400.000,00	67,03	32,47	6.492.000,00	32,47	99,50	19.892.000,00	99,50	100.000
5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.136.000,00	16.000.000,00	86,58	13.852.000,00	86,58	13,43	2.148.000,00	13,43	100,00	16.000.000,00	100,00	-
5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	6.975.000,00	9.176.000,00	84,46	7.750.000,00	84,46	15,54	1.426.000,00	15,54	100,00	9.176.000,00	100,00	-
	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi	150.000.000,00	235.000.000,00	95,74	225.000.000,00	95,74	4,37	10.000.000,00	4,26	100,00	235.000.000,00	100,00	-
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	144.000.000,00	229.000.000,00	95,63	219.000.000,00	95,63	4,37	10.000.000,00	4,37	100,00	229.000.000,00	100,00	-
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	6.000.000,00	100,00	-	-	-	100,00	6.000.000,00	100,00	-
	Penyediaan jasa Administrasi umum dan perkantoran	262.800.000,00	262.800.000,00	98,74	259.500.000,00	98,74	-	-	-	98,74	259.500.000,00	98,74	3.300.000
5.2.2.03.14	Belanja Jasa Penjaga Kantor	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	24.000.000,00	100,00	-	-	-	100,00	24.000.000,00	100,00	-
5.2.2.03.14	Belanja Jasa Penjaga Shelter	72.000.000,00	72.000.000,00	100,00	72.000.000,00	100,00	-	-	-	100,00	72.000.000,00	100,00	-
5.2.2.03.31	Belanja Jasa Operator Komputer	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	30.000.000,00	100,00	-	-	-	100,00	30.000.000,00	100,00	-
5.2.2.03.31	Belanja Jasa administrasi umum	108.000.000,00	108.000.000,00	99,17	107.100.000,00	99,17	-	-	-	99,17	107.100.000,00	99,17	900.000
5.2.2.03.31	Belanja jasa tenaga kesehatan Kebencanaan	28.800.000,00	28.800.000,00	91,67	26.400.000,00	91,67	-	-	-	91,67	26.400.000,00	91,67	2.400.000
	Penyediaan jasa publikasi dan dokumentasi	14.000.000,00	29.000.000,00	97,59	28.300.750,00	97,59	12,46	699.250,00	2,41	100,00	29.000.000,00	100,00	-
5.2.2.02.08	Belanja Umbul-umbul	2.501.000,00	2.501.000,00	91,96	2.300.000,00	91,96	-	201.050,00	8,04	100,00	2.501.050,00	100,00	(50)
5.2.2.02.08	Belanja Spanduk	3.999.000,00	3.999.000,00	87,54	3.500.750,00	87,54	12,46	498.200,00	12,46	100,00	3.998.950,00	100,00	50
5.2.2.02.08	Belanja Jasa Publikasi / Dokumentasi	7.500.000,00	22.500.000,00	100,00	22.500.000,00	100,00	-	-	-	100,00	22.500.000,00	100,00	-
					-			-	-	-			
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	590.488.400,00	195.488.400,00	20,20	39.481.617,00	20,20	73,70	144.066.750,00	73,70	93,89	183.548.367,00	93,89	11.940.033
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	440.488.400,00	45.488.400,00	82,46	37.508.600,00	82,46	-	-	-	82,46	37.508.600,00	82,46	7.979.800
5.2.1.01.02	Honorarium TIM Pengadaan Barang dan Jasa	7.716.000,00	7.716.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.716.000
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	772.400,00	772.400,00	91,74	708.600,00	91,74	-	-	-	91,74	708.600,00	91,74	63.800
5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	1.000.000,00	80,00	800.000,00	80,00	-	-	-	80,00	800.000,00	80,00	200.000
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00	36.000.000,00	100,00	-	-	-	100,00	36.000.000,00	100,00	-
5.2.3.17.04	BM Pengadaan Truk Tangki Air Kapasitas 5000 Liter	395.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	150.000.000,00	150.000.000,00	1,32	1.973.017,00	1,32	96,04	144.066.750,00	96,04	97,36	146.039.767,00	97,36	3.960.233
5.2.1.01.02	Honorarium TIM Pengadaan Barang dan Jasa	8.432.000,00	8.432.000,00	-	-	-	82,8	6.984.000,00	82,83	82,83	6.984.000,00	82,83	1.448.000
5.2.1.01.05	Honorarium pengelola teknis	1.600.000,00	1.600.000,00	-	-	-	100,0	1.600.000,00	100,00	100,00	1.600.000,00	100,00	-
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.263.800,00	1.263.800,00	100,00	1.263.800,00	100,00	-	-	-	100,00	1.263.800,00	100,00	-
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.204.200,00	1.204.200,00	58,90	709.217,00	58,90	41,1	494.750,00	41,09	99,98	1.203.967,00	99,98	233
5.2.2.20.05	BM Rehabilitasi Gedung Kantor BPBD	120.000.000,00	120.000.000,00	-	-	-	98,4	118.081.000,00	98,40	98,40	118.081.000,00	98,40	1.919.000
5.2.2.21.02	Perencanaan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	97,4	9.735.000,00	97,35	97,35	9.735.000,00	97,35	265.000
5.2.2.21.03	Pengawasan	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	-	95,6	7.172.000,00	95,63	95,63	7.172.000,00	95,63	328.000
					-			-	-				
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	69.999.900,00	94.999.900,00	21,05	20.000.000,00	21,05	33	10.000.000,00	10,53	31,58	30.000.000,00	31,58	64.999.900
	Pendidikan dan pelatihan formal	20.000.000,00	30.000.000,00	66,67	20.000.000,00	66,67	33	10.000.000,00	33,33	100,00	30.000.000,00	100,00	-
5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	20.000.000,00	30.000.000	66,67	20.000.000,00	66,67	33	10.000.000,00	33,33	100,00	30.000.000,00	100,00	-
	Bimtek SKPD	49.999.900,00	64.999.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.999.900
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.335.000,00	1.335.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.335.000
5.2.2.02.08	Belanja Spanduk	300.000,00	300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.000
5.2.2.03.15	Belanja Publikasi/Dokumentasi	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000
5.2.2.03.24	Belanja Jasa Narasumber	8.400.000,00	8.400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.400.000
5.2.2.03.24	Belanja Jasa Moderator	4.800.000,00	4.800.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.800.000
5.2.2.03.25	Belanja Jasa Peserta	18.000.000,00	18.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.000.000
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.440.900,00	2.440.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.440.900
5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang rapat/pertemuan	2.124.000,00	2.124.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.124.000
5.2.2.11.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	-	15.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000.000
5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian	4.800.000,00	4.800.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.800.000
5.2.2.1.05	Belanja Pakaian Kaos	4.800.000,00	4.800.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.800.000
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan dinas dalam Daerah	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000
					-			-	-				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN		REALISASI									SISA ANGGARAN
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	S/D Bulan Lalu			Bulan Ini			S/D Bulan Ini			
				Fisik %	Keuangan (Rp)	Keuangan %	Fisik %	Keuangan (Rp)	Keuangan %	Fisik %	Keuangan (Rp)	Keuangan %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	10.000.000,00	20.000.000,00	71,77	14.354.800,00	71,77	28,18	5.636.500,00	28,18	99,96	19.991.300,00	99,96	8.700
	Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Keuangan	10.000.000,00	20.000.000,00	71,77	14.354.800,00	71,77	28,18	5.636.500,00	28,18	99,96	19.991.300,00	99,96	8.700
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.085.400,00	2.900.200,00	100,00	2.900.200,00	100,00	-	-	-	100,00	2.900.200,00	100,00	-
5.2.2.06.01	Belanja cetak	483.600,00	483.600,00	100,00	483.600,00	100,00	-	-	-	100,00	483.600,00	100,00	-
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	1.063.500,00	1.800.000,00	59,08	1.063.500,00	59,08	40,92	736.500,00	40,92	100,00	1.800.000,00	100,00	-
5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.368.000,00	3.408.000,00	100,00	3.408.000,00	100,00	-	-	-	100,00	3.408.000,00	100,00	-
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.499.500,00	3.000.000,00	99,98	2.999.500,00	99,98	-	-	-	99,98	2.999.500,00	99,98	500
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah	3.500.000,00	8.408.200,00	41,63	3.500.000,00	41,63	58,28	4.900.000,00	58,28	99,90	8.400.000,00	99,90	8.200
										-			
	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	122.005.800,00	62.005.800,00				-	-					
	Penanganan Masalah - Masalah Strategis Yang menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa	122.005.800,00	62.005.800,00	100,00	62.005.800,00	100,00	-	-	-	100,00	62.005.800,00	100,00	-
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4.930.800,00	4.930.800	100,00	4.930.800,00	100,00	-	-	-	100,00	4.930.800,00	100,00	-
5.2.2.06.01	Belanja cetak	4.140.000,00	4.140.000	100,00	4.140.000,00	100,00	-	-	-	100,00	4.140.000,00	100,00	-
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	435.000,00	435.000	100,00	435.000,00	100,00	-	-	-	100,00	435.000,00	100,00	-
5.2.2.09.01	Belanja Sewa Excavator	60.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman kegiatan	26.000.000,00	26.000.000	100,00	26.000.000,00	100,00	-	-	-	100,00	26.000.000,00	100,00	-
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.500.000,00	2.500.000	100,00	2.500.000,00	100,00	-	-	-	100,00	2.500.000,00	100,00	-
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.000.000,00	18.000.000	100,00	18.000.000,00	100,00	-	-	-	100,00	18.000.000,00	100,00	-
5.2.2.26.01	Uang lelah Relawan	6.000.000,00	6.000.000	100,00	6.000.000,00	100,00	-	-	-	100,00	6.000.000,00	100,00	-
										-			
	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA	635.821.850,00	880.649.050,00	107,65	684.460.500,00	107,65	20,46	180.150.261,00	20,46	128,11	864.610.761,00	128,11	16.038.289
	Fasilitasi Pembentukan Desa Tangguh Bencana	99.996.000,00	50.000.000,00	2,19	2.189.250,00	2,19	764	47.810.750,00	95,62	97,81	50.000.000,00	97,81	-
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3.726.000,00	811.600,00	21,78	811.600,00	21,78	-	-	-	21,78	811.600,00	21,78	-
5.2.2.03.15	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	1.200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.03.24	Belanja Jasa Narasumber	8.400.000,00	4.200.000,00	-	-	-	100,00	4.200.000,00	100,00	100,00	4.200.000,00	100,00	-
5.2.2.03.24	Fasilitator	20.000.000,00	4.000.000,00	-	-	-	100,00	4.000.000,00	100,00	100,00	4.000.000,00	100,00	-
5.2.2.03.25	Belanja Jasa Peserta	24.000.000,00	10.800.000,00	-	-	-	100,00	10.800.000,00	100,00	100,00	10.800.000,00	100,00	-
5.2.2.06.01	Belanja cetak	1.260.000,00	838.400,00	66,54	838.400,00	66,54	-	-	-	66,54	838.400,00	66,54	-
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	1.110.000,00	450.000,00	12,55	139.250,00	12,55	69,06	310.750,00	69,06	81,60	450.000,00	81,60	-
5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman kegiatan	16.800.000,00	8.400.000,00	2,38	400.000,00	2,38	95,24	8.000.000,00	95,24	97,62	8.400.000,00	97,62	-
5.2.2.14.05	Belanja Pakaian Khusus dan Hari - hari tertentu	7.000.000,00	4.000.000,00	-	-	-	100,00	4.000.000,00	100,00	100,00	4.000.000,00	100,00	3.000.000
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	-	100,00	1.500.000,00	100,00	100,00	1.500.000,00	100,00	-
5.2.2.28.01	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	-	100,00	15.000.000,00	100,00	100,00	15.000.000,00	100,00	-
	Pengelolaan Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana	180.000.000,00	255.000.000,00	91,67	164.998.600,00	91,67	29,01	73.963.261,00	29,01	120,67	238.961.861,00	120,67	16.038.139
	Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa	-	1.700.000,00		-		100,00	1.700.000,00	100,00	100,00	1.700.000,00	100,00	-
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	5.748.600,00	5.748.600,00	100,00	5.748.600,00	100,00	-	-	-	100,00	5.748.600,00	100,00	-
5.2.2.02.06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	77.740.000,00	77.740.000,00	100,00	77.740.000,00	100,00	-	-	-	100,00	77.740.000,00	100,00	-
5.2.2.03.07	Belanja Jasa Paket/Pengiriman	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000.000
5.2.2.03.15	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	2.500.000,00	100,00	-	-	-	100,00	2.500.000,00	100,00	-
5.2.2.06.01	Belanja cetak	300.000,00	300.000,00	100,00	300.000,00	100,00	-	-	-	100,00	300.000,00	100,00	-
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	1.050.000,00	100,00	1.050.000,00	100,00	-	-	-	100,00	1.050.000,00	100,00	-
5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman kegiatan	6.640.000,00	6.640.000,00	100,00	6.640.000,00	100,00	-	-	-	100,00	6.640.000,00	100,00	-
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00	4.800.000,00	100,00	-	-	-	100,00	4.800.000,00	100,00	-
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	45.000.000,00	100,00	-	-	-	100,00	45.000.000,00	100,00	-
5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	21.221.400,00	21.221.400,00	99,99	21.220.000,00	99,99	-	-	-	99,99	21.220.000,00	99,99	1.400
	BM Pengadaan Peralatan Selam	-	73.300.000,00		-		98,59	72.263.261,00	98,59	98,59	72.263.261,00	98,59	1.036.739

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN		REALISASI									SISA ANGGARAN
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	S/D Bulan Lalu			Bulan Ini			S/D Bulan Ini			
				Fisik %	Keuangan (Rp)	Keuangan %	Fisik %	Keuangan (Rp)	Keuangan %	Fisik %	Keuangan (Rp)	Keuangan %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Pasca Bencana	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	100.000.000,00	100,00	-	-	-	100,00	100.000.000,00	100,00	-
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	970.400,00	970.400,00	100,00	970.400,00	100,00	-	-	-	100,00	970.400,00	100,00	-
5.2.2.03.24	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	36.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	910.000,00	910.000,00	100,00	910.000,00	100,00	-	-	-	100,00	910.000,00	100,00	-
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	1.009.600,00	1.009.600,00	100,00	1.009.600,00	100,00	-	-	-	100,00	1.009.600,00	100,00	-
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.110.000,00	12.110.000,00	100,00	12.110.000,00	100,00	-	-	-	100,00	12.110.000,00	100,00	-
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	55.000.000,00	85.000.000,00	100,00	85.000.000,00	100,00	-	-	-	100,00	85.000.000,00	100,00	-
	Inventarisasi dan Identifikasi Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana	49.499.800,00	49.499.800,00	100,00	49.499.800,00	100,00	-	-	-	100,00	49.499.800,00	100,00	-
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.184.600,00	1.184.600,00	100,00	1.184.600,00	100,00	-	-	-	100,00	1.184.600,00	100,00	-
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Publikasi	500.000,00	500.000,00	100,00	500.000,00	100,00	-	-	-	100,00	500.000,00	100,00	-
5.2.2.03.24	Belanja jasa Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Modeatori/Konsultan/Penyuluh	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	15.000.000,00	100,00	-	-	-	100,00	15.000.000,00	100,00	-
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	600.000,00	600.000,00	100,00	600.000,00	100,00	-	-	-	100,00	600.000,00	100,00	-
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	363.600,00	363.600,00	100,00	363.600,00	100,00	-	-	-	100,00	363.600,00	100,00	-
5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman kegiatan	4.080.000,00	4.080.000,00	100,00	4.080.000,00	100,00	-	-	-	100,00	4.080.000,00	100,00	-
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.771.600,00	7.771.600,00	100,00	7.771.600,00	100,00	-	-	-	100,00	7.771.600,00	100,00	-
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	20.000.000,00	100,00	-	-	-	100,00	20.000.000,00	100,00	-
	Pembentukan Sekolah Aman Bencana	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	50.000.000,00	100,00	-	-	-	100,00	50.000.000,00	100,00	-
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.361.400,00	1.361.400,00	100,00	1.361.400,00	100,00	-	-	-	100,00	1.361.400,00	100,00	-
5.2.2.03.15	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	714.600,00	714.600,00	100,00	714.600,00	100,00	-	-	-	100,00	714.600,00	100,00	-
5.2.2.03.24	Belanja jasa Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Modeatori/Konsultan/Penyuluh	10.200.000,00	10.200.000,00	100,00	10.200.000,00	100,00	-	-	-	100,00	10.200.000,00	100,00	-
5.2.2.03.25	Belanja Jasa Peserta	22.500.000,00	22.500.000,00	100,00	22.500.000,00	100,00	-	-	-	100,00	22.500.000,00	100,00	-
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.300.000,00	3.300.000,00	100,00	3.300.000,00	100,00	-	-	-	100,00	3.300.000,00	100,00	-
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	3.000.000,00	100,00	-	-	-	100,00	3.000.000,00	100,00	-
5.2.2.07.03	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.124.000,00	2.124.000,00	100,00	2.124.000,00	100,00	-	-	-	100,00	2.124.000,00	100,00	-
5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman kegiatan	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00	4.800.000,00	100,00	-	-	-	100,00	4.800.000,00	100,00	-
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	2.000.000,00	100,00	-	-	-	100,00	2.000.000,00	100,00	-
	Pengelolaan Manajemen Operasional PUSDALOPS	126.326.050,00	126.326.050,00	100,00	126.326.050,00	100,00	-	-	-	100,00	126.326.050,00	100,00	-
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00	100,00	-	-	-	100,00	1.000.000,00	100,00	-
5.2.2.03.31	Belanja Jasa Pramubakti	120.000.000,00	120.000.000,00	100,00	120.000.000,00	100,00	-	-	-	100,00	120.000.000,00	100,00	-
5.2.2.15.01	Belanja Cetak	168.000,00	168.000,00	100,00	168.000,00	100,00	-	-	-	100,00	168.000,00	100,00	-
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	630.000,00	630.000,00	100,00	630.000,00	100,00	-	-	-	100,00	630.000,00	100,00	-
5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.680.000,00	1.680.000,00	100,00	1.680.000,00	100,00	-	-	-	100,00	1.680.000,00	100,00	-
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.848.050,00	2.848.050,00	100,00	2.848.050,00	100,00	-	-	-	100,00	2.848.050,00	100,00	-
	Koordinasi dan Fasilitas Penanggulangan Bencana	30.000.000,00	41.446.800,00	100,00	41.446.800,00	100,00	-	-	-	100,00	41.446.800,00	100,00	-
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	503.600,00	503.600,00	100,00	503.600,00	100,00	-	-	-	100,00	503.600,00	100,00	-
5.2.2.03.24	Belanja Jasa Narasumber/Moderator	6.900.000,00	6.900.000,00	100,00	6.900.000,00	100,00	-	-	-	100,00	6.900.000,00	100,00	-
5.2.2.03.25	Belanja Jasa Peserta	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	9.000.000,00	100,00	-	-	-	100,00	9.000.000,00	100,00	-
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	600.000,00	600.000,00	100,00	600.000,00	100,00	-	-	-	100,00	600.000,00	100,00	-
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	225.000,00	225.000,00	100,00	225.000,00	100,00	-	-	-	100,00	225.000,00	100,00	-
5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat	2.124.000,00	2.124.000,00	100,00	2.124.000,00	100,00	-	-	-	100,00	2.124.000,00	100,00	-
5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman kegiatan	1.560.000,00	1.560.000,00	100,00	1.560.000,00	100,00	-	-	-	100,00	1.560.000,00	100,00	-
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.500.000,00	2.534.200,00	100,00	2.534.200,00	100,00	-	-	-	100,00	2.534.200,00	100,00	-
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.587.400,00	18.000.000,00	100,00	18.000.000,00	100,00	-	-	-	100,00	18.000.000,00	100,00	-
	Pengelolaan Shelter		58.376.400,00		-		100	58.376.250,00	100,00		58.376.250,00		150
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	-	2.604.000,00		-	-	99,99	2.603.850,00	99,99	99,99	2.603.850,00	99,99	150
5.2.2.01.03	Belanja Alat listrik dan elektronik	-	27.772.400,00		-	-	100,00	27.772.400,00	100,00	100,00	27.772.400,00	100,00	-
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	-	100.000,00		-	-	100,00	100.000,00	100,00	100,00	100.000,00	100,00	-
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	-	600.000,00		-	-	100,00	600.000,00	100,00	100,00	600.000,00	100,00	-
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	-	3.300.000,00		-	-	100,00	3.300.000,00	100,00	100,00	3.300.000,00	100,00	-
5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-	24.000.000,00		-	-	100,00	24.000.000,00	100,00	100,00	24.000.000,00	100,00	-
										-	-		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN		REALISASI									SISA ANGGARAN
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	S/D Bulan Lalu			Bulan Ini			S/D Bulan Ini			
				Fisik %	Keuangan (Rp)	Keuangan %	Fisik %	Keuangan (Rp)	Keuangan %	Fisik %	Keuangan (Rp)	Keuangan %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Simulasi Kesiapsiagaan	-	150.000.000,00	100,00	150.000.000,00	100,00	-	-	-	100,00	150.000.000,00	100,00	-
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	-	1.795.000,00	100,00	1.795.000,00	100,00	-	-	-	100,00	1.795.000,00	100,00	-
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Publikasi/Dokumentasi		1.451.000,00	100,00	1.451.000,00	100,00	-	-	-	100,00	1.451.000,00	100,00	-
5.2.2.03.24	Belanja Jasa Narasumber/Moderator	-	27.600.000,00	100,00	27.600.000,00	100,00	-	-	-	100,00	27.600.000,00	100,00	-
5.2.2.03.25	Belanja Jasa Peserta	-	53.100.000,00	100,00	53.100.000,00	100,00	-	-	-	100,00	53.100.000,00	100,00	-
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	-	9.800.000,00	100,00	9.800.000,00	100,00	-	-	-	100,00	9.800.000,00	100,00	-
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	-	3.000.000,00	100,00	3.000.000,00	100,00	-	-	-	100,00	3.000.000,00	100,00	-
5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat	-	2.500.000,00	100,00	2.500.000,00	100,00	-	-	-	100,00	2.500.000,00	100,00	-
5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman kegiatan	-	18.054.000,00	100,00	18.054.000,00	100,00	-	-	-	100,00	18.054.000,00	100,00	-
5.2.2.14.05	Belanja Pakaian Kaos		17.700.000,00	100,00	17.700.000,00	100,00	-	-	-	100,00	17.700.000,00	100,00	-
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	-	2.500.000,00	100,00	2.500.000,00	100,00	-	-	-	100,00	2.500.000,00	100,00	-
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	-	12.500.000,00	100,00	12.500.000,00	100,00	-	-	-	100,00	12.500.000,00	100,00	-
JUMLAH BELANJA		5.451.050.000,00	4.650.868.850,00	65,60	3.575.871.383,00	65,60	12,72	591.455.391,00	10,85	89,60	4.167.326.774,00	89,60	483.542.076,00

3.575.871.383,00

Mengetahui  
Pengguna Anggaran  
BPBD Kabupaten Seluma

591.455.391

-

Tais,    Januari 2019  
Kasubag Perencanaan dan Pelaporan  
BPBD Kabupaten Seluma

3.575.871.383,00

Drs. Muhpian A  
NIP 19611204 198203 1006

M. Eko Ardiyanto. ST  
NIP 19830206 200902 1004

*Progress Keuangan Tahun 2018*

Sumber : <http://monev.lkpp.go.id/tepra/summarySatker?satker=1.06.02.01&tahun=2019>